RENCANA KERJA 2025

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyusun Rencana Kerja untuk periode tahun 2025. Rencana ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor perumahan dan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun lokal.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi panduan utama bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi serta profesionalisme. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal maupun eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kami sadar sepenuhnya bahwa implementasi rencana ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan dukungan semua pihak terkait, kami yakin dapat mengatasi setiap hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap rencana ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masa depan perumahan yang lebih baik untuk semua.

Pangkalpinang, 16 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

M.BELLY JAWARI, ST. M.Si PEMBINA TK.I / IV b NIP 197907252005011008

DAFTAR ISI

Kata Pengantari
Daftar Isiiii
BAB I PENDAHULUAN1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum5
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penyusunan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH33
3.1. Telaahan Terhadap Program Nasional33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
3.3. Program dan Kegiatan41
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH53
4.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja53
4.2. Rencana Tindak Lanjut54
BAB V PENUTUP53
5.1. Uraian Penutup

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Ketiga Pasal 12 Ayat 1 huruf d, menyatakan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pangkalpinang harus segera membentuk Kelembagaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bagian Kedua Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan awasan Permukiman; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.





Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025
- 3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan



Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

- 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun ketiga RPJMD paruh ke empat dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
- Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- 4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

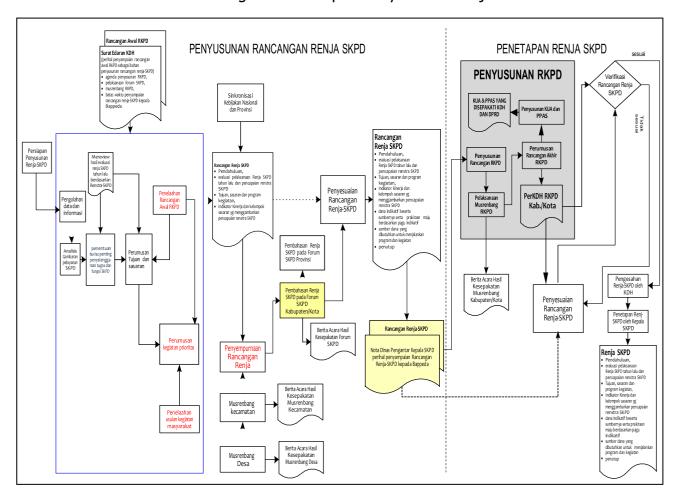
Penyusunan Laporan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkin), merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang khususnya pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja





I.2. Landasan Hukum

Perencanaan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab X Hak Asasi Manusia: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan".

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang yang antara lain meliputi :

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);





- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun





- 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 25. Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan;
- 26. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Untilitas Umum untuk Perumahan Umum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi





- Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
- 29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
- 30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
- 32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
- 34. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
- 35. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
- 36. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
- 37. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota





- Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
- 38. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Kota Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
- 39. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
- 40. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
- 41. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).
- 42. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah selain untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025, juga untuk merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat



di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

Sebagai tindaklanjut dari uraian diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang telah menyusun target yang akan dicapai oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode tiga tahun ke depan meliputi:

- 1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;
- 2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
- 4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH





Menjelaskan evalausi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.





BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, berikut ini:





TRIWULAN II Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Peran	t Kinerja dan Jaran Renja gkat Daerah berjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024 II		=		ıv	da Rei D	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat paerah yang valuasi tahun 2024	Ting Capa Kinerj Reali Angg Rens Peran Daera tahun	aian a Dan sasi aran stra gkat h s/d	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9	1	LO		11	1:	2	13
_	_	J	•		К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
1	-	010401	PROGRAM PENUNJANG U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	74,860	5.826.390.503	10	709.834.983	50	1.684.902.048	0	0	0	0	50	2.394.737.031	66,791	41,102	SEKRETARIAT
		•		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	80		10		50		0		0		50		62,500		SEKRETARIAT
2		010401201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	18.516.000	0	0	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		010401201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	17.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4		010401201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
5		010401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	3.788.018.845	17,100	616.654.631	50	1.244.173.107	0	0	0	0	50	1.860.827.738	50	49,124	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
6		010401202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	35	3.708.764.357	0	604.518.783	0	1.219.969.335	0	0	0	0	0	1.824.488.118	0	49,194	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Keglatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Ango Peran	t Kinerja dan Jaran Renja gkat Daerah berjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024 II		111		IV	da Rer D	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat aerah yang valuasi tahun 2024	Ting Capa Kinerja Reali Angg: Rens Peran Daera tahun	ian a Dan sasi aran stra gkat h s/d	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12	2	13
					К	Rp	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
7		010401202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	2.266.050	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
8		010401202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan K e u a n g a n Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	18	76.988.438	1	12.135.848	0	24.203.772	0	0	0	0	1	36.339.620	5,556	47,201	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		010401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	100	116.886.784	15	15.514.464	50	31.271.696	0	0	0	0	50	46.786.160	50	40,027	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
10		010401203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	116.886.784	1	15.514.464	1	31.271.696	0	0	0	0	1	46.786.160	100	40,027	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
11		010401204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0,185	3.198.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
12		010401204005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	12	1.599.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
13		010401204007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	12	1.599.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
14		010401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	20	169.043.392	5	3.878.616	5	87.742.924	0	0	0	0	5	91.621.540	25	54,200	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		010401205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	87.500.000	0	0	0	79.925.000	0	0	0	0	0	79.925.000	0	91,343	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		010401205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	12	51.543.392	1	3.878.616	0	7.817.924	0	0	0	0	1	11.696.540	8,333	22,693	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg: Perang	Kinerja dan aran Renja gkat Daerah erjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024 II		ı III		IV	da Rei	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat Jaerah yang evaluasi tahun 2024	Ting Capa Kinerja Reali Angg: Rens Peran Daera tahun	iian a Dan sasi aran stra gkat h s/d	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12	2	13
_	ı	J	-	J	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	К	Rp	
17		010401205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		010401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	500.990.726	7	33.622.496	50	140.581.418	0	0	0	0	50	174.203.914	50	34,772	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		010401206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	10.850.700	0	0	0	3.620.700	0	0	0	0	0	3.620.700	0	33,368	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		010401206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	8.500.000	0	0	0	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000	0	21,765	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		010401206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	85.187.050	0	0	0	620.000	0	0	0	0	0	620.000	0	0,728	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		010401206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	35.718.000	0	0	0	14.012.000	0	0	0	0	0	14.012.000	0	39,230	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		010401206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	12	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		010401206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	150.000.000	0	0	0	58.044.974	0	0	0	0	0	58.044.974	0	38,697	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		010401206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	27.271.696	0	4.378.616	0	8.567.924	0	0	0	0	0	12.946.540	0	47,472	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		010401206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	12	180.463.280	1	29.243.880	0	53.865.820	0	0	0	0	1	83.109.700	8,333	46,054	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Keglatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Peran	Kinerja dan aran Renja gkat Daerah perjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024 II		1111		IV	d Re	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat Jaerah yang syaluasi tahun 2024	Ting Capa Kinerji Reali Angg Rens Peran Daera tahun	iian a Dan sasi aran stra gkat h s/d	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						6		7		8		9		10		11	12	2	13
1	2	3	4	5	К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
27		010401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	350.103.056	12	40.164.776	50	116.558.359	0	0	0	0	50	156.723.135	50	44,765	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		010401208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	12	48.543.392	1	7.757.232	0	15.635.848	0	0	0	0	1	23.393.080	8,333	48,190	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29		010401208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	80.000.000	0	0	0	26.105.395	0	0	0	0	0	26.105.395	0	32,632	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30		010401208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	221.559.664	0	32.407.544	0	74.817.116	0	0	0	0	0	107.224.660	0	48,395	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
31		010401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	879.633.000	5	0	50	64.574.544	0	0	0	0	50	64.574.544	50	7,341	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
32		010401209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	40.450.000	0	0	0	11.823.298	0	0	0	0	0	11.823.298	0	29,229	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
33		010401209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	14	193.380.000	0	0	0	30.904.246	0	0	0	0	0	30.904.246	0	15,981	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
34		010401209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	20	44.975.000	0	0	0	21.847.000	0	0	0	0	0	21.847.000	0	48,576	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
35		010401209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	600.828.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
								F	RATA-I	RATA CAPAIAN KIN	IERJ	A (%)					64,646	41,102	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					R	SR	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Ango Peran	t Kinerja dan garan Renja gkat Daerah berjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024	ulan				Rei C	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat Jaerah yang waluasi tahun	Ting Capa Kinerja Reali Angg Rens	iian a Dan sasi aran	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				(Satuan Indikator)				1		II	ı	III		IV		2024	Peran Daera tahun	h s/d	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		LO		11	1:	2	13
					К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	К	Rp	
36	-	010402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana (Dengan Satuan:%)	100	1.367.302.953	15	194.150.248	50	266.749.060	0	0	0	0	50	460.899.308	50	33,709	BIDANG PERUMAHAN
37		010402201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabiltiasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	100	203.624.480	9	17.393.080	50	70.448.800	0	0	0	0	50	87.841.880	50	43,139	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
38		010402201002	ldentifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	27.430.696	0	3.378.616	0	7.067.924	0	0	0	0	0	10.446.540	0	38,083	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
39		010402201003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	1	929.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
40		010402201004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	28.997.696	0	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	36,025	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
41		010402201006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	1	40.195.696	0	3.378.616	0	7.312.924	0	0	0	0	0	10.691.540	0	26,599	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
42		010402201009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			106.071.392		7.257.232		49.000.028		0		0		56.257.260		53,037	Dinas Perumahan dan Permukiman
43		010402202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (Dengan Satuan:%)	100	88.024.050	9	4.378.616	50	8.567.924	0	0	0	0	50	12.946.540	50	14,708	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Peran	: Kinerja dan aran Renja gkat Daerah perjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024	ulan	ı			da Rer D	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat aerah yang valuasi tahun 2024	Ting Capa Kinerja Reali Angg Rens Peran	iian a Dan sasi aran stra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				(Satuan murator)				1		II		III 		V		2024	Daera tahun	h s/d	
1	2	3	4	5	К	6 Rp	К	7 Rp	K	8 Rp	K	9 Rp	K	l0 Rp	K	11 Rp	12 K	P. Rp	13
44		010402202001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	20	19.997.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
45		010402202004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	20	6.026.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
46		010402202009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Orang)	50	61.999.746	0	4.378.616	0	8.567.924	0	0	0	0	0	12.946.540	0	20,882	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
47		010402203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	25.000.000	5	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
48		010402203001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
49		010402205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:%)	100	866.360.285	20	157.659.104	50	140.017.918	0	0	0	0	50	297.677.022	50	34,359	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
50		010402205002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	12	866.360.285	1	157.659.104	1	140.017.918	0	0	0	0	1	297.677.022	8,333	34,359	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
51		010402206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	174.794.238	9	14.719.448	50	46.514.418	0	0	0	0	50	61.233.866	50	35,032	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Peran	: Kinerja dan Jaran Renja gkat Daerah berjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi ahun 2024 II		III		IV	d Re	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat baerah yang evaluasi tahun 2024	Ting Capa Kinerja Reas Rens Peran Daera	iian a Dan sasi aran stra gkat	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
												_					tahun		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	12	2	13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52		010402206001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	89.999.842	1	11.340.832	1	25.813.248	0	0	0	0	1	37.154.080	100	41,282	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
53		010402206003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangu nan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	75.294.496	1	3.378.616	1	20.701.170	0	0	0	0	1	24.079.786	100	31,981	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
54		010402206004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.499.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
55		010402207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Dengan Satuan:%)	100	9.499.900	5	0	50	1.200.000	0	0	0	0	50	1.200.000	50	12,632	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
56		010402207001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	1	9.499.900	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	12,632	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
								F	RATA-	-RATA CAPAIAN KIN	IERJA	(%)					50,000	33,709	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					SR	SR	
57	-	010403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Dengan Satuan:%)	86	2.318.762.968	98	76.520.872	98	1.111.123.732	0	0	0	0	98	1.187.644.604	100	51,219	BIDANG PERMUKIMAN
58		010403201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	100	72.996.392	11	7.757.232	45	20.494.556	0	0	0	0	45	28.251.788	45	38,703	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Perang	Kinerja dan aran Renja gkat Daerah perjalan 2024		Realisa		erja Pada Triwi hun 2024					d Re	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat Jaerah yang evaluasi tahun 2024	Ting Capa Kinerja Reali Angg Rens Peran	ian Dan sasi aran tra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				(Sacaan markacor)				1		II				V		7	Daera tahun	h s/d 2024	
1	2	3	4	5	К	6 Rp	К	7 Rp	К	8 Rp	K	9 Rp	K	Rp	K	11 Rp	12 K	Rp	13
59		010403201001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	1	72.996.392	1	7.757.232	1	20.494.556	0	0	0	0	1	28.251.788	100	38,703	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
60		010403202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dengan Satuan:%)	60	269.936.380	7	17.893.080	40	61.609.836	0	0	0	0	40	79.502.916	66,667	29,452	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
61		010403202001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	105.171.492	0	6.757.232	1	26.382.848	0	0	0	0	1	33.140.080	100	31,511	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
62		010403202003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Kelompok Masyarakat)	1	89.765.192	0	7.757.232	1	15.635.848	0	0	0	0	1	23.393.080	100	26,060	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
63		010403202004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.999.696	0	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	41,787	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
64		010403202007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	1	25.000.000	0	0	1	12.523.216	0	0	0	0	1	12.523.216	100	50,093	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
65		010403202009	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah (Dengan Satuan:Rumah Tangga)	50	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Keglatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Peran	Kinerja dan aran Renja gkat Daerah perjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024 II		ı III		IV	Re C	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat aerah yang avaluasi tahun 2024	Ting Capa Kinerja Reali Angg: Rens Peran Daera	nian a Dan sasi aran stra gkat h s/d	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
																	tahun		
1	2	3	4	5		-		7		8		9		10			12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
66		010403203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha (Dengan Satuan:%)	100	1.975.830.196	10	50.870.560	54	1.029.019.340	0	0	0	0	54	1.079.889.900	54	54,655	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
67		010403203007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	43.880.000	0	3.378.616	1	7.067.924	0	0	0	0	1	10.446.540	100	23,807	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
68		010403203009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh			1.931.950.196		47.491.944		1.021.951.416		0		0		1.069.443.360		55,356	Dinas Perumahan dan Permukiman
								ı	RATA-	RATA CAPAIAN KIN	IERJ <i>A</i>	A (%)					100,000	51,219	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					ST	R	
69	-	010404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	97	638.003.272	20	11.885.848	45	88.269.508	0	0	0	0	45	100.155.356	46,392	15,698	BIDANG PERMUKIMAN
70		010404201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh (Dengan Satuan:%)	0	638.003.272	1	11.885.848	40	88.269.508	0	0	0	0	40	100.155.356	100	15,698	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
71		010404201001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	16	638.003.272	0	11.885.848	0	88.269.508	0	0	0	0	0	100.155.356	0	15,698	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
									RATA-	RATA CAPAIAN KIN	IERJ <i>A</i>	A (%)					46,392	15,698	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Angg Peran	: Kinerja dan Jaran Renja gkat Daerah berjalan 2024		Realisa		nerja Pada Triwi hun 2024	ulan	1			da Rei	Realisasi paian Kinerja an Anggaran nja Perangkat Jaerah yang waluasi tahun	Ting Capa Kinerja Reali Angg Rens	nian a Dan sasi aran stra	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				(Satuan Indikator)				1		II		III		v		2024	Peran Daera tahun	h s/d	
1	2	3	4	5	К	6 Rp	К	7 Rp	K	8 Rp	K	9 Rp	K I	l0 Rp	K	11 Rp	12 K	2 Rp	13
72	-	010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:%)	97,200	1.011.651.964	10	36.741.144	50	698.303.300	0	0	0	0	50	735.044.444	51,440	72,658	BIDANG PERUMAHAN
73		010405201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang dibangun (Dengan Satuan:Unit)	9	1.011.651.964	1	36.741.144	1	698.303.300	0	0	0	0	1	735.044.444	11,111	72,658	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
				Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan (Dengan Satuan:%)	100		10		60		0		0		60		60		SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
74		010405201001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	87.832.192	1	10.340.832	0	33.550.500	0	0	0	0	1	43.891.332	100	49,972	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
75		010405201002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	10	850.794.922	1	22.021.696	1	654.969.876	0	0	0	0	2	676.991.572	20	79,572	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
76		010405201003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	1	48.025.000	1	4.378.616	1	8.567.924	0	0	0	0	1	12.946.540	100	26,958	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
77		010405201005	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Dengan Satuan:Laporan)	1	24.999.850	1	0	1	1.215.000	0	0	0	0	1	1.215.000	100	4,860	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
								F	RATA-	RATA CAPAIAN KIN	IERJ <i>A</i>	A (%)					51,440	72,658	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					R	S	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Angg Peran	: Kinerja dan Jaran Renja gkat Daerah berjalan 2024		Realisa		inerja Pada Triwu ahun 2024 II		1111		IV	da Rei	Realisasi paian Kinerja an Anggaran ja Perangkat aerah yang valuasi tahun 2024	Ting Capa Kinerj Reali Angg Ren: Peran Daera tahun	aian a Dan isasi aran stra ngkat ah s/d	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	1:	2	13
					К	Rp	К	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
78	-	010406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)	100	4.700.000	8	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	BIDANG PERUMAHAN
79		010406201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Urilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	4.700.000	5	0	30	0	0	0	0	0	30	0	30	0	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
80		010406201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	1	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
								ı	RATA-	-RATA CAPAIAN KIN	ERJ/	A (%)					30,000	0,000	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					SR	SR	
					<u> </u>	RATA-RATA	A CAPAIAI	N KINERJA DAN A	ANGG	GARAN SEMUA PROG							58,160	35,731	
										PREDIKAT	KIN	ERJA					R	SR	
-		keberhasilan kin		- Kesiapan Tim pelaksana	danya kendala dilapangan														
		at pencapaian kin	nerja: m triwulan berikutnya:	- Adanya kendala dilapangan	anya kendala dilapangan														
Tino		ı diperlukan dala	m Renja Perangkat																

N	lo	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realis	asi Kinerja Pada Triw tahun 2024	rulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran	an Dan Unit Kerja asi Perangkat Daerah ran Penanggung-jawab ra kat s/d
							1	П	III IV	dievaluasi tahun 2024	Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
	,	2	2	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13
		_				K Rp	K Rp	K Rp	K Rp K Rp	K Rp	K Rp	

Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 12-07-2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA PANGKALPINANG

> M. BELLY JAWARI,ST,M.Si. NIP.197907252005011008

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Dalam mencapai target kinerjanya, dibutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, dan juga dibutuhkan dukungan dana serta ide kreatif, hal ini tidak bisa hanya dikerjakan dan ditumpukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasi yang membidanginya, inilah yang menjadi kendala diinternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang.

Secara garis besar permasalahan pokok kinerja pelayanan bidangperumahan dan permukiman meliputi; rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan.

Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi;

rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Permasalahan pokok persampahan meliputi;

masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah.





Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase.

Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannnya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.

Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi;

perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar dengan kota-kota menengah dan kecil, serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan. Menurut Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang



Pemerintahan Daerah Huruf D, Sub Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman memiliki 4 (empat) Urusan yaitu :

1. Perumahan

Pembagian Urusan untuk Perumahan, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi Site Plan pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- d. Fasilitasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Permukiman

Pembagian Urusan untuk Permukiman, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Pengkajian dan Pengawasan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pembagian Urusan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota

4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pembagian Urusan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal Penyelenggaraan PSU perumahan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sesuai tabel berikut:





Tabel 2.3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Unit OPD Penanggung Jawab
1	3	7		12	13	14 = 6 + 12	16
	, J		Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,826,390,503 Rata	2,394,737,031 -rata Capaian Kinerja	41.02% 41.02.00%	2,394,737,031	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Predikat Kiner				\$1.02.00% S		
2	Program Pengembangan Perumahan		1,367,302,953	460,899,308	33.70%	103,589,832	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Rata-rat	a capaian kinerja (%) Predikat Kinerja	33.70% R		
3	Program Kawasan Permukiman		2,318,762,968	1,187,644,604	51.21%	50,915,576	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rat	51.21%				
				Predikat Kinerja	S		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		638,003,272	100,155,356	72.65%	22,961,004	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Rata-rat	72.65%				
				Т			
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		1,011,651,964	735,044,444	10.31%	48,281,976	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Rata-rat	10.31%			
				R			





6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan						
	Registrasi Bidang Perumahan dan						DINAS PERUMAHAN DAN
	Kawasan Permukiman		4 700 000	0	0.000/	0	KAWASAN
	Permukiman		4,700,000 Rata-rat	0 a capaian kinerja (%)	0.00%	U	PERMUKIMAN
			Nata rat	30%			
		DANI DANI		Predikat Kinerja	R		
	JUMLAH ANGGAI		11 166 011 660	4 070 400 742		4 070 400 742	
	REALISASI DARI		11,166,811,660	4,878,480,743		4,878,480,743	
	SELURUH PROGRAM						
			AIAN KINERJA DA BRAM (PROGRAM	58.16%			
	PREDIKAT KINERJ	A DARI SE	ELURUH PROGRA	S			

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam menopang pembangunan berkelanjutan maka perlu didukung beberapa langkah-langkah strategis yang diestimasi akan berpengaruh dalam pembangunan daerah ini, untuk itu diperlukan adanya identifikasi sekaligus tindakan analisis. Faktor strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2024-2026 dapat dianalisis melalui lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatknya Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) dan rendahnya angka pemenuhan rumah terutama bagi MBR;
- 2. Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum memadai.





1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2. Program Pengembangan Perumahan
- 3. Program Kawasan Permukiman
- 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kmuh
- 5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
- 6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkatan kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Kebijakan dan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan





program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi sarpras PSU, dan pengentasan Kawasan kumuh, terkendala prilaku atau pola fikir beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penganggaran dan pembangunan program pemerintah;
- b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- c. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, draenase, Ruang Terbuka Publik dsb;

2.5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- A. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bermukim bagi masyarakat melalui :
 - 1) Pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni;
 - 2) Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan korban relokasi program pemerintah;





- 3) Penyusunan Pedoman, standar dan petunjuk teknis pelaksanaan;
- 4) fasilitasi termasuk monev pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi rumah bersubsidi serta realisasi pembangunan dan pemanfaatannya;
- 5) Pemuktahiran data perumahan;
- 6) pengembangan RUSUNAWA.
- B. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan perumahan melalui:
 - 1) Pembangunan PSU Lingkungan Perumahan;
 - 2) Pemeliharaaan PSU Lingkungan Perumahan;
 - 3) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan PSU Lingkungan Perumahan;
 - 4) Pemuktahiran data kawasan lingkungan permukiman kumuh

2.5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
- 2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
- 3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi.
- 4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh
- 5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU)
- 6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil





BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Program Nasional

Mengacu pada Renstra Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 pada point 3.3.4 tentang ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG "Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau", dijelaskan bahwa :

Tujuan ketiga pada Renstra Kementerian PUPR adalah terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang mengacu pada Visinya yaitu "Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi", dan Misi I yaitu Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan





menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulaupulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui;

- a) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;
- b) Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta
- c) Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibiltas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan



yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional:

- a) kawasan industri/KEK,
- b) Kawasan pariwisata,
- c) pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana,





- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi,
- e) keterkaitan desa dan kota
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya
 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar),
- g) daerah tertinggal, dan
- h) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah:

- a) kawasan industri/KEK;
- b) Kawasan pariwisata;
- c) pengembangan kota hijau yang berketahan iklim dan bencana;





- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi;
- e) keterkaitan desa dan kota;
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya
 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar);
- g) daerah tertinggal; dan
- h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional.

Visi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah :

- Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;





 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

- Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
- 2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
- 5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024, adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan:

- 1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
- 2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
- 3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau;





- 4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
- 5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran ke-3 : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.





Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebaga	ai Faktor
No	Menengah Renstra K/L	Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.	Kurangnya Kesadaran dan peran serta masyarakat untuk Bersama-sama berusaha keluar dari zona kumuh	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah	Masih ada warga yang meminta RLH berupa PB padahal dalam rap dan anggarannya adalah PK	Adanya penganggaran berkelanjutan dan sosialisasi pra pembangunan

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perunahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan asas otonomi dan tugas pembantuan, meliputi : perencanaan, bangunan gedung, perumahan, PSU dan permukiman, pengendalian bangunan





III.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sebagai berikut: "Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, produktif dan berkelanjutan"

III.2.2. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: "Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau"

III.3. Program dan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas maupun kegiatan belanja langsung yang telah disetujui oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pangkalpinang. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang meliputi :

- Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang;
- 2. Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota;
- 3. Penajaman program melalui forum SKPD;
- 4. Penyelarasan program-program yang selanjutnya dilakukan penelaahan





sebagai program prioritas.

Dari uraian diatas dan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Perumahan

- Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota





- 3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 4. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 5. Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

Program Kawasan Permukiman

- 1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
 Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah
 (Sepuluh) Ha

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kulaifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan beserta pendanaannya yang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang pada perubahan renja Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:





RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERAN	GKA PENDANAAN	N		KELOMPOK	PRAKIRA	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		RITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
							2023				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN DAN K	AWASAN PERMUKIMAN	I			ı	9.038.841.926,00							2.903.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.038.841.926,00							2.903.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						9.038.841.926,00							2.903.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	75,06 Nilai 90 Nilai			74,96 Nilai 85 Nilai	6.132.348.926,00						75,06 Nilai 90 Nilai	2.903.000.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %			100 %	0,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perend	canaan Perangkat Daerah								•			•		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan L	aporan Capaian Kinerja dan Ikh	ı tisar Realisasi K	inerja SKPD						1	1				
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %			100 %	3.965.841.926,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	2.903.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjang	an ASN	ı			1	1	ı	1	1			1	1	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	3.965.841.926,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERAI	IGKA PENDANAAN	ı		KEI OMDOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	DED ANGLES T DA ED ALL
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIO NASIONAL	RITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan I	 Laporan Keuangan Akhir Tahun S	SKPD				1								
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan I	Laporan Keuangan Bulanan/ Triw	ulanan/ Semes	teran SKPD									•		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir	100 %			100 %	30.000.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik	Daerah pada SKPD		•		•			•				-1		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD	0,185 %			0,180 %	0,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,182 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi D	aerah				1									
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retrik	busi Daerah		1	1	1	1	1	1	1	1			1	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAN	NGKA PENDANAAN	ı		KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERA
	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		RITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWA
											NASIONAL	DAERAH				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-100 %			-37,5 %	150.000.000,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
1	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas be	eserta Atribut Kelengkapannya													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
1	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan A	Administrasi Kepegawaian							•				•		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
1	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pe	 gawai Berdasarkan Tugas dan Fu	ungsi				I			I	1				L
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	50.000.000,00	Pinang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
1	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	643.774.000,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
+	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Insta	asi	I	1	1	ı	1	I	ı	I	1		1	1	<u> </u>
		Listrik/Penerangan Bangunar														

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERAN	GKA PENDANAAN	ı		VEI ONDOV		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	DEDANOKAT DAESA
KODE	KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rn)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIO	RITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rn)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAE
			OPD		2024	2025	Trice menutin (np)	20.0.0.	OGMIDEN DANA	NASIONAL	DAERAH		17.11.021	i nee memerin (ne)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.993.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMAI
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Pe	erlengkapan Kantor													
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	264.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah	n Tangga					•			•			•		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9.795.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik K	antor				I	1	1					_ L		l
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	100.000.000,00	Pinang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan	l dan Penggandaan					1								
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	49.986.000,00	Pinang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	RODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN / SUB CONTROL SUB CO	RODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KATO KATO KATO KATO KATO KATO KATO KATO	RODE WILSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN /	KODE KODE KODE KODE KEGIATAN / SUB KEGIATAN / S	NOBE URUSAN PECGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN K	NODE	NDIATOR PROGRAM NEGIATAN NUMBER NAME NAME	Note	No. No.	Note Note	Note Note	March Marc	March Marc	Marie Court Marie Court

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	I				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
0	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	D4 011 INDUCATIO (D.)	1.01/1.01	0,1110=5,54114	PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN			PERANGKAT DAERAI PENANGGUNG JAWA
		KEGIATAN		OPD	TAHUN 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koord	dinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	200.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAI
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis	pada SKPD													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sister	l n Pemerintahan Berbasis Elektro	L onik pada SKPE))						l					
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	0,00	Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	1.061.753.000,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	NERJA DAN KERAN	NGKA PENDANAAN	N				AN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
>	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIO	RITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAI
		REGIATAN		OPD	TAHON 2023	2024	2025	PAGU INDIKATIF (KP)	LUKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGO INDIKATIF (KP)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi	, Sumber Daya Air dan Listrik				_				_					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	Umum Kantor	1			'		'	'	•	'		1	1	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	981.753.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %			100 %	280.980.000,00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAI
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemelihara	an, Biaya Pemeliharaan, dan Paj	jak Kendaraan F	Perorangan Dinas	s atau Kendaraan D	inas Jabatan	1	1	1	1			1	1	1
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAI

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAN	IGKA PENDANAAN	I		KEI OMBOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	DEDANGKAT DAEDAU
NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIO NASIONAL	RITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	219.880.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan I	Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	20.850.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge	dung Kantor dan Bangunan Lain	nya												
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kab/kota	100 %			100 %	1.108.144.000,00						100 %	0,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabiltiasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana	100 %			100 %	137.636.000,00			-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Pote	ı nsial sebagai Lokasi Relokasi Pe	rumahan							I			_I	I	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	3.259.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERAN	IGKA PENDANAAN	N		KEI OMBOK	PRAKIRA	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
ОИ	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIO	DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	43.459.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lok	asi yang Berpotensi Terkena Rel	okasi Program I	Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lok	asi Rawan Bencana Kabupaten/k	Kota		I	1	1	1	1	1	1				
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	60.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Sumber Daya Manusia Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	100 %			100 %	29.152.000,00			-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Pe	l Inyediaan dan Rehabilitasi Rumal	l h kepada Masya	l arakat/Sukarelaw	l van Tanggap Benca	l na	I	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	2.734.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
\dashv	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan 1	 	l n Fasilitator							I					
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20 Orang	4.509.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Wilayah Percepatan Penangana n Kemiskinan	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	IERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAN	1		KELOMBOK	PRAKIRA	AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		DRITAS	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAE
2	3	4	5	6	7	0	9	10	11	NASIONAL 12	DAERAH 13	14	15	16	17
2	3	4	3	0	ı ı	0				12	13	14	13		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				0 Orang	21.909.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %			100 %	790.000.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAI KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan	n Rumah Susun Umum dan/atau	Rumah Khusus	1		•	1	1	1	1	•	ı			
		Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	790.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan	100 %			100 %	141.897.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitm	nen Penerbitan Izin Pembanguna	ın dan Pengemb	angan Perumah	an Terintegrasi Sec	ara Elektronik	1					I		1	I
		Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	64.354.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi F	ı Pengendalian Pembangunan dan	Pengembangar	n Perumahan		1	1		1	1					
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				0 Laporan	62.409.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi k	Kerja Sama Pemerintah Daerah d	dengan Badan U	Jsaha (KPDBU) F	Perumahan Umum/F	Rumah Susun U	mum		•				•		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum				0 Laporan	15.134.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Fasilitasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	100 %			100 %	9.459.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi F	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan	Bangunan Ged	ung (SKBG)		·				•					
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)				0 Laporan	9.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAN	IGKA PENDANAAN	l 		KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERA
0	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA		RITAS	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWA
				OPD		2024	2025	,			NASIONAL	DAERAH			, , ,	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	93.00 %			93.00 %	475.042.000,00						93.00 %	0,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana	100 %			100 %	49.975.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi P	enyelenggaraan Kawasan Perm	ukiman												
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	49.975.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100 %			80 %	246.817.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisa	si Kebijakan Bidang PKP													
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	73.100.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN D. KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kel	ompok Swadaya Masyarakat di	Permukiman Ku	muh				<u> </u>	I	I.					
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				1 Kelompok Masyarakat	53.127.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN D KAWASAN PERMUKIM
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi	Perumahan dan Permukiman K	umuh			l		l					l	1	I
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	120.590.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN D KAWASAN PERMUKIM
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	100 %			60 %	178.250.000,00			-	-	-	80 %	0,00	DINAS PERUMAHAN D KAWASAN PERMUKIM
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Pen	yelenggaraan Kawasan Permuk	iman Kumuh	'		•		ı	1	•			•	1	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	178.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DA KAWASAN PERMUKIMA
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	98 %			98 %	641.605.000,00						98 %	0,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	2 %			2 %	641.605.000,00			-	-	-	2 %	0,00	DINAS PERUMAHAN D KAWASAN PERMUKIM

		URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM /	INDIKATOR PROGRAM /	TARGET AKHIR	REALISASI CAPAIAN	PRAKIRAAN CAPAIAN		CAPAIAN KIN	ERJA DAN KERAI	NGKA PENDANAAI	N		KELOMPOK		AAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	PERANGKAT DAERAH
NO	KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIC	DAERAH	SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				2 Unit Rumah	641.605.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU	98.00 %			98.00 %	652.243.000,00						98.00 %	0,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan	100 %			100 %	652.243.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSI	U Perumahan		'		'		1		1	1		1		1
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	59.284.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Saran	ı na, dan Utilitas Umum di Perumal	l han untuk Menu	ınjang Fungsi Hu	nian	1	I				1			. L	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				0 Lokasi	450.541.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi da	I alam rangka Penyediaan Prasara	L ana, Sarana, da	I Utilitas Umum	Perumahan	1				<u> </u>	1				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan	42.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PS	U Perumahan dari Pengembang		'		•		1		1	•		1	1	1
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				0 Laporan	99.959.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100 %			100 %	29.459.000,00						100 %	0,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan	100 %			100 %	29.459.000,00			-	-	-	100 %	0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024		CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDA					KELOMPOK	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA			SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.06.2.01.0001	.04.06.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0 Laporan	29.459.000,00	Pinang, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	JUMLAH								2.903.000.000,00							

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

IV.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja (Renja)

Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- 1. Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
- 2. Sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD setiap tahun
- Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD dalam
 (satu) tahun

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota melalui Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2024. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif atau reses.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan rehab jalan setapak/ jalan lingkungan, pembangunan dan rehab drainase, pembangunan talud, plat duiker, pembangunan dan pemeliharaan taman, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para



pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam rencana kerja SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

IV.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan mengoptimalisasikan pemanfaatkan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengikuti dinamika zaman dan tantangan untuk mewujudkan penataan Kota Pangklapinang yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi harus disampaikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang meliputi detail/rinci Perumahan Layak Huni, Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi serta penetapan kelembagaan dan koordinasi yang lebih efektif diantara instansi guna mendukung perencanaan dan penentuan kebijakan pembiayaan serta untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dan strategis, serta berkelanjutan.





BAB. V

PENUTUP

V.1. Uraian Penutup

Rencana Kerja merupakan dokumen yang berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Dinas dalam kurun waktu satu tahun. Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk memberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan terhadap rencana strategis Dinas dan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah agar kegiatan dapat berjalan secara baik dan terarah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu penyusunan Rencana Kerja diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi keuangan, hasil dan juga manfaatnya bagi masyarakat.

Selain dengan melakukan inventarisasi/pendataan berbagai data dan informasi yang relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan kegiatan yang direncanakan, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang juga merupakan implementasi dan regulasi serta kerangka kebijakan yang disusun untuk 1 (satu) tahun untuk rencana dinas.

Dari Uraian yang kami sajiakan diatas, saat ini kami menyajikan Renja Tahun 2025 berdasarkan program-program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan





dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengelola Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas dalam rangka mendukung tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif menuju terwujudnya visi dan misi kota Pangkalpinangg tahun 2024-2026.



